



**SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : SIWALIMA**

Friday, 17 June 2016

**LKPJ Gubernur 2015**

## **DPRD Soroti Pendapatan Daerah Menurun**

**Ambon** - Pansus Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DPRD Maluku akhirnya mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada pihak pemprov Maluku. Satu diantaranya pendapatan daerah kedepan tak boleh turun lagi.

Ketua Pansus LKPJ Gubernur Maluku, Said Mudzakir Assagaff kepada wartawan usai paripurna penyerahan rekomendasi di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Kamis (16/6) menjelaskan secara umum rekomendasi yang diberikan mengenai hal-hal yang ditemui dalam LKPJ tersebut.

“Ada tiga hal yang menjadi indikator penilaian Pansus tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan dan tugas terkonsentrasi. Secara umum Pansus menilai LKPJ ini sudah cukup bagus tetapi ada beberapa SKPD dan hal yang harus menjadi perhatian pemprov,” ujarnya

Hal pertama adalah pendapatan daerah ditahun 2015 yang tidak mencapai target. Pendapatan yang ditargetkan harus mencapai Rp 2 trilyun tahun 2015 hanya bisa dipenuhi 89 persen dan lebih rendah dari tahun sebelumnya sekitar 90 persen dan diharapkan kedepannya capaian pendapatan tidak boleh lagi turun.

Kemudian di beberapa bidang seperti pendidikan dan kesejahteraan masyarakat juga diharapkan menjadi perhatian pemprov.

“Untuk bidang pendidikan, kualitas guru di Maluku masih jauh dari standar nasional. DPRD mendorong agar peningkatan kualitas guru yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Kemudian untuk angka kemiskinan, naik lagi beberapa persen setelah sempat turun hingga 18 persen pada tahun 2014. Untuk itu, program pemberdayaan masyarakat perlu menjadi perhatian,” ungkap Assagaff.

Politisi PKS ini menjelaskan tingkat pengangguran terbuka yang di Maluku masih dalam jumlah yang besar untuk itu pemprov mendorong investasi sehingga terbuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sehingga angka pengangguran bisa terus ditekan.

“Evaluasi juga diberikan kepada bidang perhubungan dimana karena minimnya transportasi laut akses barang dan jasa hingga ke daerah-daerah terluar itu tidak bisa sampai. Kami juga mendorong pemerintah provinsi meningkatkan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota supaya program kerja bisa terimplementasi dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu, Wagub Maluku, Zeth Sahubura dalam sambutannya saat paripurna mengatakan rekomendasi yang diberikan menjadi catatan kritis dan konstruktif atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pemprov.

“Rekomendasi ini akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti. Rekomendasi ini juga menjadi catatan bagi kami untuk meningkatkan kemitraan secara intensif dan profesional dalam upaya mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel,” tandasnya



**SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : SIWALIMA**

Sahuburua menambahkan beberapa keberhasilan dalam pengelolaan laporan keuangan telah dicapai dalam tahun 2015 misalnya capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK yang diharapkan akan bertahan pada tahun-tahun berikutnya. **(S-42)**